

**PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGAREANAK NOMOR 09 TAHUN
2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA NGAREANAK
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) "PERMATA
MADANI PARAMARTA"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAREANAK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Permata Madani Paramarta", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Permata Madani Paramarta" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E No, 4);
8. Peraturan Desa Ngareanak No 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngareanak Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2020 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngareanak Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Permata Madani Paramarta" (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK

dan

KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NGAREANAK NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
NGAREANAK PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
(BUMDESMA) "PERMATA MADANI PARAMARTA"**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngareanak
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDESMA.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDESMA.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Permata Madani Paramarta"

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngarcanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDESMA, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDESMA “Permata Madani Paramarta”
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Permata Madani Paramarta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) berubah menjadi Rp. 80.000.000,- (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang semula bersumber dari Dana Desa (DD) berubah menjadi Dana Lain-Lain. Hal ini tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa Bersama “Permata Madani Paramarta” Kecamatan Singorojo diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa Bersama.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngareanak

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DESA NGAREANAK,



AGUNG WIDJOJO, S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 10 Februari 2023

SEKRETARIS DESA NGAREANAK

UDIAWAN, S.T

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2023 NOMOR 02